DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2024—2025
SELASA, 25 MARET 2025

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swasti Astu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang kami hormati:

- **Para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Para Anggota DPR RI; dan**
- **Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.

Pada kesempatan pertama, izinkanlah atas nama Pimpinan DPR RI dan segenap Anggota DPR RI, kami menyampaikan rasa duka dan simpati yang mendalam untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah akibat cuaca ekstrim, baik banjir maupun tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Semoga masyarakat yang terdampak bencana diberikan

keselamatan dan kekuatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada masa persidangan ini, Pemerintah dan DPR RI melakukan pembahasan dan persetujuan atas rencana efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025; DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah tersebut, agar dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat; Pemerintah sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih sejahtera, mudah dan tentram.

Upaya Pemerintah melakukan efisiensi APBN merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh Pemerintah sebagai pelaksanaan atas amanat Undang Undang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa "*Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada*

peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan." Oleh karena itu, efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi Pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan Undang Undang.

Kehidupan berdemokrasi kita pada saat ini, telah menempatkan rakyat sebagai subjek dari kebijakan publik yang dibuat oleh Negara.

Oleh karena itu, Negara dalam mengambil kebijakan publik harus mawas diri, mendengarkan aspirasi rakyat, dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat; Negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan mensejahterahkan rakyat;

Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya, menunggu 1

(*satu*) hari saja akan terasa sangat lama; tetapi bagi kita, DPR RI dan Pemerintah, terkadang membahas masalah rakyat dan mencari solusinya seringkali bisa berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Maka dari itu, marilah menjadi komitmen kita bersama untuk dapat merespon secara cepat dan tepat setiap keluhan masalah rakyat: permasalahan lapangan pekerjaan, masalah sekolah, masalah layanan rumah sakit, masalah petani nelayan, dan lain sebagainya. Negara harus hadir tanpa harus menunggu rakyat mem-viralkan dan menuntut kehadiran negara.

Bertindak cepat tidak berarti kita mengabaikan tata kelola yang baik; kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas; Niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya.

Kita harus membangun budaya kerja "***membiasakan yang benar***" dan bukannya malah "***membenarkan yang biasa***".

Sidang Dewan yang Terhormat,

DPR RI bersama dengan Pemerintah telah menyetujui 3 (*tiga*) Rancangan Undang-Undang untuk menjadi Undang-Undang dan akan melanjutkan proses pembahasan terhadap 7 (*tujuh*) Rancangan Undang-Undang yang saat ini masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, dimana 6 (*enam*) di antaranya merupakan Rancangan Undang-Undang *carry over* dari periode sebelumnya.

Pada masa persidangan ini, DPR RI juga telah menyetujui 12 (*dua belas*) Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI.

Salah satu indikator bagi rakyat dalam menilai kinerja DPR RI adalah dalam menjalankan fungsi legislasi.

Pembentukan Undang Undang, harus dilakukan bersama-sama antara DPR RI dan Pemerintah; oleh karena itu Pencapaian kinerja dalam hal legislasi, merupakan komitmen bersama antara DPR RI dan Pemerintah; Kinerja legislasi merupakan tanggung jawab bersama antara DPR RI dan Pemerintah.

Masa Persidangan II ini, fungsi anggaran DPR RI, diarahkan pada pembahasan efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025.

DPR RI, melalui komisi-komisi terkait, telah melaksanakan berbagai rapat kerja dengan mitra kerja; untuk memberikan persetujuan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga. DPR RI menekankan pentingnya

kebijakan efisiensi ini dapat berjalan dan kepentingan rakyat tetap dapat dipenuhi.

DPR RI akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan Undang Undang APBN Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait dengan pelaksanaan efisiensi dan penajaman program di Kementerian/Lembaga.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI telah memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, antara lain:

1. Penanganan bencana hidrometeorologi (banjir dan tanah longsor) yang terjadi di sejumlah wilayah;
2. Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, terutama stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan serta pasokan BBM;
3. Permasalahan ketidaksesuaian volume dan harga MinyaKita;

4. Kesiapan pemenuhan standar pelayanan minimum jalan tol untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan tol menjelang mudik lebaran;
5. Perubahan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK;
6. Persiapan KPU dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
7. Penanganan masalah tata kelola pengadaan dan kualitas BBM;
8. Persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M;
9. Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja, termasuk pemenuhan hak-hak karyawan yang terkena dampak PHK;
10. Kesiapan Pemerintah dalam penyelenggaraan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
11. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
12. Kesiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025; dan

13. Evaluasi penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*).

DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerja untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari setiap Rapat Kerja dengan DPR RI; Tindak lanjut yang dijalankan Pemerintah menunjukan komitmen kenegaraan dalam hubungan legislatif dan eksekutif.

Pada masa persidangan ini, DPR RI telah membentuk Tim Pengawas, yaitu:

1) Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
2) Tim Pengawas Penanganan Bencana.

Tim Pengawas tersebut diharapkan dapat lebih intensif dalam mempercepat tindak lanjut yang diperlukan.

DPR RI juga telah memberikan persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan dan/atau pemilihan dan penetapan pejabat publik dan nonpejabat publik, antara lain:

1. Pimpinan KPK Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;
2. Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Indonesia; dan
3. Pewarganegaraan terhadap 6 (*enam*) orang atlet sepak bola.

Sidang Dewan yang Terhormat

DPR RI, dalam menjalankan fingsi diplomasi, telah menghadiri berbagai sidang parlemen di forum Global.

Pada masa sidang ini, delegasi DPR RI menghadiri pertemuan *Asian Parliamentary Assembly* (APA) di Baku;

Selain kegiatan multilateral tersebut, parlemen DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan duta besar dan delegasi negara sahabat seperti Iran, Romania, Polandia, Bosnia dan Herzegovina, Australia, Belarus, Kuba, Singapura, Palestina, Rusia, Guatemala, Filipina, Mongolia, Georgia, Yordania, Kazakstan, Romania, Turki, dan Vietnam.

DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) telah meresmikan pembentukan 102 (*seratus dua*) Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan parlemen negara-negara sahabat untuk periode 2024–2029 pada tanggal 30 Januari 2025;

DPR RI juga tengah mempersiapkan penyelenggaraan sidang internasional, yaitu Konferensi

ke-19 *Parliamentary Union of the OIC Member States* (PUIC) yang akan diselenggarakan pada bulan Mei 2025 di Jakarta.

Peran dan kerja sama DPR RI dalam berbagai forum internasional tersebut diharapkan dapat ikut memperkuat politik luar negeri Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Saatnya, kita akan menjalankan masa reses; Masa Reses adalah masa Anggota DPR RI melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR RI, untuk melaksanakan kunjungan kerja di masyarakat pada dapilnya masing-masing.

Gunakanlah masa reses untuk bertemu dengan rakyat; laporkan kepada rakyat tugas-tugas konstitusional yang telah kita jalankan; persatukan rakyat dalam semangat gotong royong; dengarkanlah keluh kesah rakyat; riang gembiralah bersama rakyat; apalagi masa reses ini juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri; bersama dengan rakyat menjalin silaturahmi Idul Fitri;

Atas nama Pimpinan DPR RI, saya umumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa mulai tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 16 April 2025, DPR RI memasuki Masa Reses, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.

Selamat menjalani masa reses dan menyapa rakyat.

Atas Nama Pimpinan DPR RI, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN:

- **Rancangan Undang-Undang yang telah menjadi Undang-Undang:**
  1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; dan
  2. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

- **Rancangan Undang-Undang pada Pembicaraan Tingkat I:**
  1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; *(carry over)*
  2. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan; *(carry over)*
  3. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; *(carry over)*
  4. RUU tentang Hukum Acara Perdata; *(carry over)*

5. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika; *(carry over)*
6. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara; dan *(carry over)*
7. RUU tentang Perubahaan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; *(carry over/*RUU Kumulatif Terbuka).

- **Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI:**

1. RUU tentang Hukum Acara Pidana;
2. RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo;
3. RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo;
4. RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara;
9. RUU tentang Kabupaten Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara;
10. RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara;

11. RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara; dan
12. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- **Pewarganegaraan atlet sepakbola:**

1. Tim Henri Victor Geypens;
2. Dion Wilhelmus Eddy Markx;
3. Ole Lennard ter Haar Romenij;
4. Emil Audero Mulyadi;
5. Joey Mathijs Pelupessy;
6. Dean Ruben James.

- **Kegiatan diplomasi parlemen:**

Sidang yang telah dihadiri oleh delegasi DPR RI antara lain:

1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD);
2. Forum Open Government Partnership (OGP) Asia and the Pacific Region;
3. UN Parliamentary Hearing at the United Nations;
4. Women Parliamentarians Program to the Munich Security Conference;

5. Asian Parliamentary Assembly (APA);
6. The fifty-fourth (54th) session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO (PCWTO).